

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini disampaikan simpulan dan saran dalam penelitian ini. Simpulan dan saran yang disampaikan pada dasarnya merupakan Simpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Adapun simpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Adapun dari pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, disimpulkan bahwa terdapat Pengaruh antara Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah. Kemudian secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kemampuan anggota terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin baik.
2. Secara parsial hipotesis kedua memiliki pengaruh yang signifikan dengan taraf signifikansi adalah 0,040. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan uji interaksi, disimpulkan bahwa H_0

diterima. Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, maka akuntabilitas tidak memperkuat pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka dari itu setiap penambahan akuntabilitas sebesar satu satuan akan menyebabkan berkurangnya pengaruh pengetahuan anggota legislatif daerah tentang anggaran terhadap pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kelemahan yang penulis temukan terkait dengan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian akuntabilitas sebagai faktor yang bisa melemahkan atau menguatkan (moderating). Berikut ini penulis mengajukan beberapa saran diantaranya:

1. Anggota Legislatif Daerah Kabupaten Sukabumi khususnya untuk anggota komisi anggaran perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang anggaran dalam rangka untuk meningkatkan pengawasan APBD. Pendidikan dan pelatihan sangat perlu dilakukan terutama dengan sangat dinamisnya perkembangan regulasi peraturan di lingkungan sektor pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi media yang efektif agar aparatur terkait mengetahui prosedur pelaksanaan anggaran yang baik yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan anggota legislatif tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran sehingga anggota legislatif dituntut untuk mengetahui peraturan tentang anggaran agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

2. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki wewenang untuk menyetujui dan menilai pelaksanaan APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif hendaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas APBD dengan memberikan pengarahan dan pengawasan dalam rangka perbaikan atas hasil pemeriksaan dan temuan yang diberikan oleh BPK, sehingga dengan hal tersebut Pemerintah Daerah dapat memenuhi prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik dalam pelaksanaan APBD.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas subjek penelitian, merubah atau menambah variabel lain misalnya komitmen politik, psikologi dewan, pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan tidak terbatas pada komisi anggaran saja, namun diperluas dikomisi lainnya, kemudian perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti. Kemudian lingkup penelitian diperluas diwilayah lain atau memperluas wilayah lain (regional) atau bahkan

provinsi lainnya di Indonesia. Supaya hasil penelitiannya dapat digeneralisasi.

